

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Telaahan Arah Kebijakan dan Tema Pembangunan Kepala Daerah Sumatera Selatan

Visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Periode 2018 - 2023 ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan pada periode tersebut serta untuk mengidentifikasi faktor - faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Tersebut.

Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, pasangan H. Herman Deru dan H. Cik Ujang resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan untuk masa jabatan 2025 - 2030 yang memiliki Visi sebagai berikut :

“Sumsel Maju Terus Untuk Semua”

Pemahaman terhadap visi “Sumsel Maju Terus Untuk Semua” dapat dijelaskan sebagai berikut :

- ***Sumsel*** memiliki makna salah satu wilayah di Indonesia yang terletak di bagian Selatan Pulau Sumatera. Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berada di Kota Palembang, dengan jumlah penduduk sebanyak 9.064.690 jiwa pada tahun 2024. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di Utara, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung di Timur, Provinsi Lampung di Selatan dan Provinsi Bengkulu di Barat. Provinsi Sumatera Selatan merupakan tempat pusat Kerajaan Sriwijaya pada abad ke- 7 Masehi hingga akhir abad ke-14 dengan luas wilayah seluas 86.771,918 km² atau 4,6 persen dari total luas Indonesia.
- ***Maju*** bermakna bergerak, menjadi lebih baik, berkembang menuju kemajuan pembangunan suatu masyarakat atau daerah kabupaten/kota. Kemajuan pembangunan itu dapat pula bersifat fisik dan nonfisik baik untuk lapisan masyarakat maupun daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berpusat pada Ibukota Provinsi, melainkan diarahkan kepada pemerataan dan keadilan bagi kemajuan kabupaten dan kota dengan mengutamakan kerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

- **Terus** bermakna kata berkesinambungan dan berkelanjutan serta tidak berhenti yang merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberlanjutan melibatkan tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dimensi sosial, keberlanjutan berarti mampu menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya. Dimensi ekonomi mengacu pada kemampuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang layak, dan dimensi lingkungan berfokus pada perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.
- **Semua** mengandung arti keadaan atau kondisi seluruh/segenap/sekalian lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan menikmati hasil dari kemajuan pembangunan, sedangkan dalam konteks wilayah, keadaan atau kondisi kemajuan pembangunan yang dilakukan secara merata dan adil baik di tingkat kabupaten maupun di kota untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan ketimpangan antar wilayah.

Untuk mencapai Visi tersebut, terdapat 7 misi yaitu :

Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.

Misi 2 : Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Misi 3 : Mewujudkan keterkaitan (*nexus*) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.

Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Misi 5 : Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.

Misi 6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.

Misi 7 : Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan menyusun Rencana Strategisnya dengan menetapkan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan dan tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tersebut.

2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tahun periode 2025-2029, tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan yaitu penjabaran dari Misi 4 Gubernur Sumatera Selatan, dengan tujuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, yaitu meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, serta memiliki sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akses Pelayanan Air Minum;
2. Meningkatnya Akses Pelayanan Sanitasi;
3. Meningkatnya Kualitas Kawasan serta Bangunan Gedung dan Rumah;
4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Akses Air Minum Layak	89,35	90,35	92,76	95,18	97,59	100,00
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	80,54	82,43	84,32	86,22	88,11	90,00
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	65,01	68,6	69,6	70,6	71,6	72,6
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	34,00	38,00	40,50	43,00	43,10	43,20

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategis pembangunan tidak lepas dari kondisi nyata capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima tahun sebelumnya yaitu Rencana Strategis periode 2019-2023 serta periode 2024-2026 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan menghasilkan berbagai kemajuan yang berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang dapat bermuara pada capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra.

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
1	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	1.1	Meningkatnya Akses Pelayanan Air Minum	1.1.1	Akses Air Minum Layak	%	89,35
				1.1.2	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	%	1,60
				1.1.3	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	%	78,98
		1.2	Meningkatnya Akses Pelayanan Sanitasi	1.2.1	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik		
				1.2.2	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	80,54
				1.2.3	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	8,00
				1.2.4	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	16,67
	Meningkatnya Kualitas Kawasan serta Bangunan gedung dan Rumah	1.3	Meningkatnya Kualitas Kawasan serta Bangunan gedung dan Rumah	1.3.1	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	83,97
				1.3.2	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	%	83,09
				1.3.3	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani	%	12,40
				1.3.4	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	49,54
				1.3.5	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	%	21,86
				1.3.6	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	41,43
				1.3.7	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	31,00
				1.3.8	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	%	67,00
	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.4.1	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak tertanggulangi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan harus diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya.

2.3 Pohon Kinerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2025, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan berpedoman pada pohon kinerja yang menjelaskan tentang kerangka acuan kerja. Pohon kinerja tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Lampiran 1.

2.4 Perjanjian Kinerja

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ditetapkan target kinerja berupa kesepakatan dalam pencapaian target tahun 2025. Target kinerja tersebut digunakan sebagai ruang lingkup tugas pelaksanaan program dan kegiatan dari pimpinan instansi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yang disertai dengan indikator kinerja. Target kinerja tahun 2025 itu dituangkan didalam Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah). Tujuan perjanjian kinerja yaitu mendorong komitmen penerima amanah dalam melaksanakan amanah yang diterimanya dan diharapkan terus meningkatkan kinerjanya. Perjanjian kinerja juga berfungsi menciptakan tolok ukur kinerja yakni sebagai alat untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan serta sasaran organisasi.

Indikator Kinerja dan Program Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan dijabarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Sebelum Perubahan

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani	%	11,43%
		Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	%	36,10%
2	Terselenggaranya Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	83%
3	Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	%	89,35%
4	Meningkatnya Pengelolaan Sanitasi Lingkungan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	81,62%
5	Meningkatnya Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung dan Lingkungan Yang Berstandar Teknis	Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani	%	33%

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Setelah Perubahan

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Akses Air Minum Layak	%	89,35
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	80,54
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	65,01
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	%	34,00

➤ **Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Sebelum Perubahan**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Ade Irma Nasution No.10 Palembang, Sumatera Selatan

Email : perencanaandisperkimsumsel@gmail.com

Telp. 321977, 317837 Fax. 321977

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. NOVIAN ASWARDANI, ST., M.M., IPM., ASEAN. Eng
Jabatan : KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ELEN SETIADI, S.H., M.S.E
Jabatan : Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ELEN SETIADI, S.H., M.S.E

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ir. H. NOVIAN ASWARDANI, ST., M.M., IPM.,
ASEAN. Eng
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197511251999031004

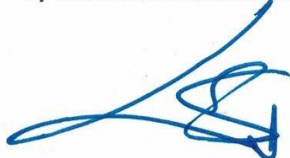
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang ditangani	11,43%
		Persentase Satuan Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU	36,10%
2	Terselenggaranya Perbaikan Rumah Penduduk Pasca Bencana	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	83%
3	Meningkatnya Cakupan Infrastruktur Air Minum	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	89,35%
4	Meningkatnya Pengelolaan Sanitasi Lingkungan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	81,62%
5	Meningkatnya Kualitas/Kuantitas Bangunan Gedung dan Lingkungan Yang Berstandar Teknis	Persentase Penataan Bangunan Gedung yang Tertangani	33%

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 34.498.334.678	APBD
2 Program Pengembangan Perumahan	Rp 2.921.400.000	APBD
3 Program Kawasan Permukiman	Rp 19.275.000.000	APBD
4 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Rp 50.792.500.000	APBD
5 Program Pengembangan Permukiman	Rp 8.460.000.000	APBD
6 Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Rp 200.000.000	APBD
7 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 1.425.000.000	APBD
8 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp 350.000.000	APBD
9 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 2.325.000.000	APBD
10 Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 1.300.000.000	APBD
11 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp 4.775.000.000	APBD
12 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 4.617.100.000	APBD

Palembang, 31 Januari 2025

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



ELEN SETIADI, S.H., M.S.E

KEPALA DINAS
 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 PROVINSI SUMATERA SELATAN



Ir. H. NOVIAN ASWARDANI, ST., M.M., IPM., ASEAN. Eng
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 197511251999031004

➤ **Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan Setelah Perubahan**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Ade Irma Nasution No.10 Palembang, Sumatera Selatan

Email : perencanaandisperkimsumsel@gmail.com

Telp. 321977, 317837 Fax. 321977

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. H. Novian Aswardani, ST., M.M., IPM., ASEAN. Eng

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : H. Herman Deru

Jabatan : Gubernur Sumatera Selatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 29 Oktober 2025

Pihak Kedua
Gubernur Sumatera Selatan,

Pihak Pertama
Kepala Dinas
Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan,

H. Herman Deru

Ir. H . Novian Aswardani, ST., M.M., IPM.,
ASEAN. Eng
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP . 197511251999031004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya akses air minum dan sanitasi serta terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Akses Air Minum Layak	%	89,35%
		Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	%	34,00%
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	80,54%
		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	65,01%

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp	28.668.082.851	APBD
2.	Program Pengembangan Perumahan	Rp	2.650.528.904	APBD
3.	Program Kawasan Permukiman	Rp	16.730.644.158	APBD
4.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Rp	52.111.979.725	APBD
5.	Program Pengembangan Permukiman	Rp	8.162.115.022	APBD
6.	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Rp	119.947.840	APBD
7.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	871.350.350	APBD
8.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Drainase	Rp	42.845.800	APBD
9.	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp	-	-
10.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	2.084.232.217	APBD
11.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	1.097.833.565	APBD
12.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp	2.287.656.039	APBD
13.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp	3.762.104.072	APBD

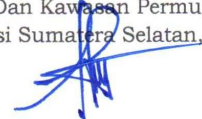
Palembang, 29 oktober 2025

Gubernur Sumatera Selatan,



H. Herman Deru

Kepala Dinas
Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan,



Ir. H. Novian Aswardani, ST.,M.M.,IPM.,ASEAN.Eng
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197511251999031004

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp 34.498.334.678
2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	83,97%	Rp 2.921.400.000
		Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	83,09%	
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani	12,4%	Rp 19.275.000.000
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	49,54%	Rp 50.792.500.000
5	Program Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	21,86%	Rp 200.000.000
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Akses Air Minum Layak	89,35%	Rp 1.425.000.000
		Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	1,6%	
7	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	1,10%	Rp 350.000.000
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	80,54%	Rp 2.325.000.000
		Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	8%	
9	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	78,98%	Rp 8.460.000.000
10	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	41,43%	Rp 1.300.000.000
11	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	31%	Rp 4.775.000.000
12	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	67%	Rp 4.617.100.000

Tabel 2.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2025 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	
1	2	3	4	5	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	Rp	28.668.082.852
2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	83,97%	Rp	2.650.528.904
		Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	83,09%		
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10 - 15 Ha yang Ditangani	12,4%	Rp	16.730.644.158
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	49,54%	Rp	52.111.979.725
5	Program Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	21,86%	Rp	119.947.840
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Akses Air Minum Layak	89,35%	Rp	871.350.350
		Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	1,6%		
7	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional	1,10%	Rp	-
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	80,54%	Rp	2.084.232.217
		Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	8%		
9	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	16,67%	Rp	42.845.800
10	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	78,98%	Rp	8.162.115.022
11	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	41,43%	Rp	1.097.833.565
12	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	31%	Rp	2.287.656.039
13	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	67%	Rp	3.762.104.072